



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

JAZ

JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



JAZ VOLUME 6 NOMOR 1

BENGKULU, JUNI 2023

ISSN: 2620-8555

Penanggung Jawab : Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penanggung Jawab Redaksi : Helmi Herawati, S.E., M.Si

Pimpinan Redaksi : Helvoni Mahrina, SE., MM

Dewan Penyunting : 1. Dr.Fachruzzaman, SE, MDM, AK, CA
(Universitas Bengkulu)
2. Dr.Rini Indriani, SE, M.Si, Akt
(Universitas Bengkulu)

Sekretariat : Seftya Dwi Shinta, SE., M.Ak

Operator Web : Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak

Alamat Redaksi : Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536.
Email: jazunihaz@gmail.com
Web : <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz>

MITRA BESTARI

No	Nama Reviewer	Perguruan Tinggi
1	Dr. DWI ERMAYANTI SUSILO, SE.MM	STIE PGRI Dewantara Jombang
2	Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
3	Bambang Arianto, SE., M.Ak	STISIP Banten Raya
4	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CADE., CTA.	Universitas Jember
5	Dwi Prastiyo Hadi. SE.M.Si	Universitas PGRI Semarang
6	Debbi Chyntia Ovami, S. Pd , M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
7	Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs.	STIE Syariah Bengkulu

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DAFTAR ISI

<p>PENGARUH PROFITABILITAS DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI</p> <p>Pratami Eka Aulia Syawali¹⁾, Idang Nurodin²⁾ dan Hendra Tanjung³⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> pratamiaulia069@ummi.ac.id¹ idang1261@gmail.com² hendratanjung515@ummi.ac.id³</p>	1-11
<p>DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DALAM MENGANTISIPASI RESESI DUNIA 2023</p> <p>Sri Indah*;Sukarno Himawan W <i>Prodi Akuntansi, Universitas Tribhuwana Tunggal Dew Malang</i> indahsri729@gmail.com</p>	12-21
<p>STUDI LITERATUR: ANALISIS PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT DELAY</p> <p>Mutiara Octaviani Yudiah¹⁾, Prilcilia Kartika²⁾, Carmel Meiden³⁾ <i>Institute Kwik Kian Gie, Jakarta</i> 0382202004@student.kwikkiangie.ac.id¹ 0382202007@student.kwikkiangie.ac.id² carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id³</p>	22-32
<p>PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Kasus Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)</p> <p>Deisyaaulia Aulia Yusuf¹⁾ dan Elan Eriswanto²⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> deisyaaulia11@gmail.com¹, Elaneriswanto@ummi.ac.id²</p>	33-45
<p>PENGARUH KOMPLEKSITAS AUDIT, PROFITABILITAS KLIEN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP AUDIT FEE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KONTRUKSI DAN BANGUNAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021.</p> <p>Erika Yulia Putri¹⁾, Nina Yulianasari²⁾, Helmi Herawati³⁾ <i>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> erikayuliap98@gmail.com</p>	46-57
<p>ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI SAK EMKM</p> <p>Ghina Salsabila¹⁾, Sulaeman²⁾, Iqbal Noor³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> ghinasalsa0903@gmail.com, sulaeman1342@ummi.ac.id, iqnorr@ummi.ac.id</p>	58-66

<p>PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, PENILAIAN PASAR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BEI PADA TAHUN 2019-2021</p> <p>Selvi Linda¹⁾ dan Erwin Febriansyah²⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Bengkulu</i> Selvilinda08@gmail.com, Erwinfebriansyah@gmail.com</p>	67-79
<p>ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS E-COMMERCE PADA APLIKASI PENJUALAN ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)</p> <p>Dina Aulia¹⁾, Elan Eriswanto²⁾ <i>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> dinaaulia143@gmail.com, elaneriswanto@ummi.ac.id</p>	80-88
<p>PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI DAN MODAL MINIMAL INVESTASI TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL PADA MAHASISWA FEB UNHAZ</p> <p>Helvoni Mahrina¹⁾ Seftya Dwi Shinta²⁾ <i>Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia</i> vonnybk@gmail.com¹, seftiyashinta01.ss@gmail.com²</p>	89-98
<p>ANALISA KEMAMPUAN PREDIKSI LABA DAN ARUS KAS DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA MENDATANG</p> <p>Lutfi Aziz¹⁾, Sugiyono²⁾ <i>Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan Bengkulu</i> Lutfiaziz2112@gmail.com¹, Sugionoks81@gmail.com²</p>	99-108
<p>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU</p> <p>Agung Setyo Dhicky¹⁾, Fathul Hilal Perdana Kusuma²⁾ <i>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> agungsetiodhicky58@gmail.com, fathul.hilal.5758@gmail.com</p>	109-120

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Agung Setyo Dhicky¹⁾, Fathul Hilal Perdana Kusuma²⁾

agungsetiodhicky58@gmail.com, fathul.hilal.5758@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Abstrak

The purpose of this study was to determine whether economic growth affects the financial performance of district / city governments in Bengkulu province. the data source used in this study is secondary data. The sample used in this study was saturated method. which amounted to 10 (ten) consisting of 9 (nine) regencies and 1 (one) municipality in Bengkulu Province. The total sample studied for 1 year period 2019 - 2021, so there were 30 samples. The results showed that PAD had a significant effect on Local Government Financial Performance. Fiscal Balance Fund has no significant effect on Government Financial Performance Capital Expenditure has no significant effect on Local Government Financial Performance. Economic Growth has no significant effect on Local Government Financial Performance.

Keyword : local own-source revenue, Balancing funds, Capital expenditure, Economic growth, Local government financial performance

Latar belakang

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pPusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, daripada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik (ASP)

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggung jawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Contoh organisasi / lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemerintah pusat & daerah maupun lembaga bukan milik pemerintah. Rumah sakit dan lembaga pendidikan pun biasa menggunakan akuntansi jenis ini. Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansinya. Standar sistem akuntansi negara, terutama lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang harus disesuaikan dengan standar akuntansi di setiap lembaga. Ukuran prestasi dan kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi sektor publik. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan pun menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi ini. (Mardiasmo, 2018)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia M. F., 2017)

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari (Muyasa, 2019) :

1. Pajak daerah
 - 1) Pajak daerah
 - a) Pajak hotel
 - b) Pajak parkir
 - c) Pajak restoran dari rumah makan
 - d) Pajak Hiburan
 - e) Pajak reklame
 - f) Pajak penerangan jalan
 - g) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

- h) Pajak pemanfaatan air bawah tanah
- 2) Sedangkan pajak provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 2. Retribusi daerah
 - a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
 - b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
 - c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
 - d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

 - 1) Retribusi jasa umum
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
 - c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
 - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:
 - (1) Retribusi pelayanan kesehatan
 - (2) Retribusi pelayanan kebersihan
 - (3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - (6) Retribusi pelayanan pasar
 - (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - (9) Retribusi pengantian biaya cetak peta
 - (10) Retribusi pengujian kapal perikanan
 - 2) Retribusi jasa usaha
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - 3) Retribusi perizinan tertentu
 - Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- c) Retribusi Izin Gangguan
 - d) Retribusi Izin Trayek
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
 4. Lain-lain PAD yang sah
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
 - f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak
 - i. Pendapatan denda retribusi
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - k. Pendapatan dari pengembalian
 - l. Fasilitas social dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, 2007)

Dana Perimbangan (DP)

Dana perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

UU Nomor 33 Pasal 1 ayat 19 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. UU yang sama di Pasal 1 ayat 08 menyebutkan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 33 Pasal 1 ayat 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Belanja Modal Pemerintah (BM)

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007). Belanja Modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal yang dimaksud untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya atau bisa juga dengan membeli.

Jenis – jenis Belanja Modal

Berdasarkan pengertian dari belanja modal diatas, maka ada beberapa jenis Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah dan diperbaharui diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal pada umumnya ada 5 (lima) , yaitu:

1. Belanja Modal Tanah.
2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Menurut (Adisasmitha, 2013) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Didalam buku (Suwadi; Winanto, 2012) Carla Poli menyatakan dalam bukunya bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai dua pengertian. Pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan nasional di suatu negara dari tahun ke tahun. Pengertian ini sangat umum dan dipandang kurang sempurna, karena selain proses pertumbuhan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, terjadi juga pertumbuhan penduduk, sehingga pertambahan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, belum tentu meningkatkan taraf hidup penduduknya. Kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu negara. Di samping itu, dalam pembahasan dan analisis pertumbuhan pendapatan Nasional, harus diperhatikan juga kenaikan tingkat harga yang terjadi dari tahun ke tahun.

Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sebenarnya harus dihitung menurut harga tetap. Dengan demikian dalam pengertian kedua, pendapatan perkapita berarti pendapatan rata-rata tiap penduduk suatu negara. Apabila pertumbuhan pendapatan Nasional pada tahun tertentu lebih kecil dari pada pertumbuhan penduduk, maka perekonomian dikatakan tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi apabila tingkat pendapatan nasional yang dinilai menurut harga tetap adalah lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu. Maka dapat dilihat aspek dinamis suatu perekonomian, yakni bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun (Ro'azah, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah)

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut.

Menurut (Sirojuzilam, 2008) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititik beratkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor. Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan

tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, yaitu :

1. Pendekatan produksi
2. Pendekatan Pengeluaran
PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari :
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
 - d. Pembentukan stok
 - e. Ekspor netto (ekspor dikurang impor)
3. Pendekatan pendapatan

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013).

Menurut (Sari, 2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. (Mahsun, 2013) mengatakan bahwa “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantumengalokasikansumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Sifat dalam penelitian yaitu metode penelitian eksplanasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu menyatakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi berjumlah 10 kabupaten/kota, terdiri dari 9 kabupaten dan 1 Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini metode jenuh. yang berjumlah 10 (sepuluh) terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya pada Provinsi Bengkulu. Total sampel yang diteliti selama 1 tahun periode 2019 - 2021, maka penelitian terdapat 30 sampel.

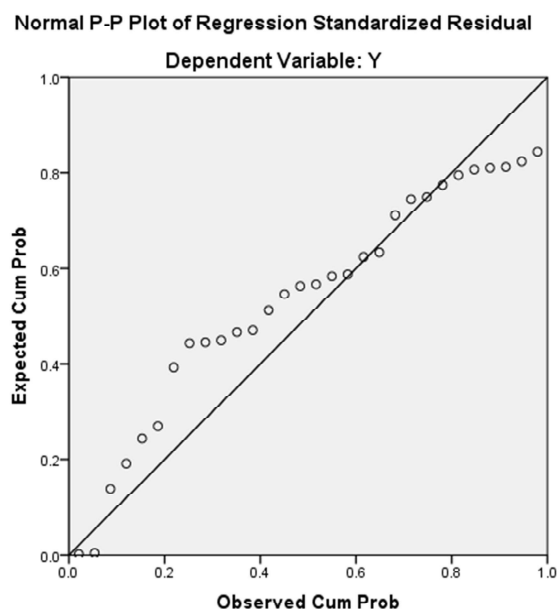
Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistic yang terdiri dari Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan data dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal ataupun berdistribusi tidak normal

Uji Normalitas



Gambar diatas dapat dilihat bahwa Bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal, dengan demikian data ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF dibawah 10 atau diatas Tolerance di atas 0,1. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uji Multikolinieritas

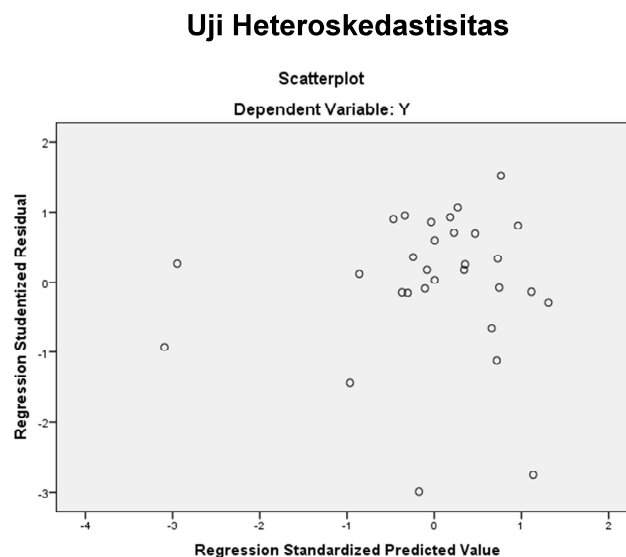
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.450	2.222
	X2	.483	2.070
	X3	.665	1.504
	X4	.871	1.149

Sumber : Output SPSS, Coefficients Multikolinieritas, 2022

Tabel diatas menunjukkan semua variabel independen memiliki semua nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,1. berarti dinyatakan tidak terdapat gangguan multikolinieritas pada model dalam penelitian ini, sehingga model regresi ini dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Menguji heteroskedastisitas dengan cara memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED yang dimana heteroskedastisitas akan terlihat dengan pola tertentu pada grafik. Grafik uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Sumber : Output SPSS, Coefficients Heteroskedastisitas Scatterplot, 2022

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Titik pada grafik relatif menyebar berada di atas bawah dan disekitar 0 yang bermakna bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas pada mode penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat ada hubungan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan tujuan. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Perimbangan
- X₃ = Belanja Modal
- X₄ = Pertumbuhan Ekonomi
- e = eror

Tabel 4.1.3.1
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	88.654	3.831	
X1	-.094	.029	-.758
X2	.004	.007	.140
X3	.017	.018	.176
X4	-.398	.425	-.158

Sumber : Output SPSS 24, Uji Regresi Linier Berganda, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa dapat dibuat persamaan regresi dengan data panel untuk variabel Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja keuangan pemerintah kabupaten / kota di provinsi Bengkulu ialah sebagai berikut:

$$Y = 88,654 - 0,094X_1 + 0,004X_2 + 0,017X_3 - 0,398X_4 + \epsilon$$

Uji Koefisien Determinan (R2)

Hasil uji koefisien derterminan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.3.2
Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.379	.279	4.46634

Sumber : Ouput SPSS, Model Summary Uji Koefisien Determinan, 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil regresi diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,279, hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi variabel independen Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi variabel dependen Kinerja Keuangan sebesar 27,9 % dan sisanya 72,1% yang dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak di teliti.

Uji Statistik T

Hasil uji statistik t-statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.3.3
Uji Statistik T (Uji Parsial)

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	23.139	.000
	X1	-3.224	.004
	X2	.617	.543
	X3	.908	.372
	X4	-.937	.358

Sumber : ouput SPSS Coefficients, Uji Statistik T, 2022

Berdasarkan tabel uji statistik T diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah
Nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar $0,004 < 0,005$ sehingga menunjukkan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan
Nilai signifikan untuk variabel Dana perimbangan daerah yaitu sebesar $0,543 > 0,005$. hasil analisis ini memberikan arti bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja modal
Nilai signifikan untuk variabel Pendapatan asli daerah yaitu sebesar $0,372 > 0,005$ hasil analisis ini memberikan arti bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.
4. Pertumbuhan Ekonomi
Nilai signifikan untuk variabel Pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar $0,358 > 0,005$. hasil analisis ini memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil determinasi adalah variabel independen Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi variabel dependen Kinerja Keuangan sebesar 27,9 % dan sisanya 72,1% yang dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak di teliti.
2. Hasil pengujian t menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3. Secara keseluruhan berdasarkan pengolahan data penelitian, maka dapat diketahui urutan signifikansi variable independen terhadap variable dependen sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (X_1) dengan nilai signifikan sebesar $0,004 < \alpha (0,05)$
 - 2) Pertumbuhan Ekonomi (X_4) dengan nilai signifikan sebesar $0,358 < \alpha (0,05)$
 - 3) Belanja Modal (X_3) dengan nilai signifikan sebesar $0,372 < \alpha (0,05)$
 - 4) Dana Perimbangan (X_1) dengan nilai signifikan sebesar $0,543 < \alpha (0,05)$

SARAN

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran dari penulis, adalah :

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, alangkah lebih baik jika menambahkan variabel penelitian yang digunakan
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya dapat melakukan konfirmasi langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode tahun anggaran tidak hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2020, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas M. Methusala, F. N. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Legalitas Lahan. *JURNAL GOVERNANCE*, II, 4-5.
- Baldric, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik. *UPP STIM YKPN*.
- Carunia, M. F. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Carunia, M. F. (2017). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- ecia, m. (2016). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82-91.
- Halachmi, A. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. *international journal of productivity and performance management*, 54.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Heryanti, C. D., Wahidah, w., & Suryono, B. (2019, Agustus 8). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akunatnsi*, 8.
- I. W., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 88-97.
- Kabupaten, K. (1997). *SEKILAS BENGKULU*. Retrieved Agustus 17, 2022, from Pemerintah Provinsi Bengkulu: <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/>
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. (n. virgo, Ed.) Yogyakarta: Andi.
- Munter, S. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, . *UNIVERSITAS SUMATERA UTARA*, 16-40.
- Muyasa. (2019). ANALIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MEMBIAYAI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2007. *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS*, 13-19.
- N, M. (2019). Kinerja Keuangan. *Universitas Islam Indonesia*, 12-39.
- Pemerintah, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah. *UU Nomo 71 Pasal 1 Ayat 5*.
- Peraturan Pemerintah, R. (2020). Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. *Undang Undang Nomor 10 Pasal 1 Ayat 6*.
- Peraturan Pemerintrah, R. (2009). Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Undang Undang Nomor 28 Pasal 1*.

- Perimbangan, D., Sisa, D. A., Pembiayaan, L., Gede, D., Atika, Y., Putu, S., . . . Gde, L. (2017, juli 1). ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN / KOTA SE - BALI. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 9, 15-29.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*, 1-141.
- RI, P. P. (2004). Dana Perimbangan. *UU Nomor 33 Pasal 1*, 1.
- Ro'azah, A. (2004). Bab ii kajian pustaka 2.1. *STEI Indonesia*, 6-25.
- Sartika. (2019). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG*, 12-14.
- Standar Akuntansi Pemerintahan, K. S. (2020, oktober 13). *PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD*. Retrieved agustus 17, 2022, from blud.co.id: <https://blud.co.id/wp/peranan-dan-tujuan-pelaporan-keuangan-blud/>
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *skripsi. surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Heryanti, Wahidahwati, & Bambang, PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR, 2019